

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semakin tingginya tuntutan manusia terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong para elit pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik dalam pemerintahannya. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan dari tugas pemerintah kepada masyarakat ataupun pihak yang terlibat lainnya. Dimana, salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk upaya nyata dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan/organisasi pada suatu periode yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan/organisasi tersebut. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Gasper, 2019). Laporan keuangan merupakan suatu cerminan untuk mengetahui pemerintahan itu berjalan baik atau tidak.

Suatu Laporan keuangan harus mampu menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), merupakan salah satu Syarat terpenuhinya laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah berkualitas atau memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota (LKPD) mendapatkan review tahunan dengan konsultasi atau dibawah pengawasan dari Badan Pengawasan Tinggi (BPK). Hasil review tersebut disajikan sebagai opini BPK dengan tingkatan tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Namun, pada faktanya, Lembaga pemerintahan di Indonesia sekarang ini sedang dipenuhi dengan fenomena semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dituntut untuk memberikan informasi yang akuntabel kepada publik. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah tabel mengenai perembangan opini tahun 2013-2022 berdasarkan tingkat pemerintah daerah:

Tabel 1. 1 Daftar Opini LKPD Tahun 2013-2022

Pemerintahan	Kabupaten					Kota					
	Tahun	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total
	2013	30%	64%	4%	2%	100%	41%	57%	2%	0%	100%
	2014	41%	50%	8%	1%	100%	60%	40%	0%	0%	100%
	2015	54%	38%	7%	1%	100%	65%	33%	2%	0%	100%

Eli Sintawati, 2024

PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemerintahan	Kabupaten					Kota				
	2016	66%	29%	5%	0%	100%	77%	22%	1%	0%
2017	72%	24%	4%	0%	100%	85%	14%	0%	0%	100%
2018	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	88%	11%	1%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%
2020	77%	23%	0%	0%	100%	91%	9%	0%	0%	100%
2021	80%	20%	0%	0%	100%	92%	8%	0%	0%	100%
2022	91%	9%	0%	0%	100%	96%	4%	0%	0%	100%

Sumber: IHPS BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat terlihat bahwa data hasil temuan BPK RI dari tahun 2013-2022 yang terjadi pada seluruh tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa ada beberapa opini yang menunjukkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) pada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota. Dimana, pada tingkat kabupaten mengalami penurunan terhadap opini WTP pada tahun 2019 sebesar 11% dari yang sebelumnya 88% menjadi 77% pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2020 juga terdapat penurunan opini WTP pada tingkat kota. Dimana pada tahun 2019 di tingkat kota persentase tingkat WTP nya itu sudah 94% namun turun 3% menjadi 91% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas laporan keuangan pada tahun 2018 dan 2020.

Disamping itu, sama halnya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Garut yang diperiksa oleh BPK RI. Berikut daftar perkembangan opini LKPD tahun 2013-2022 pada pemerintah Kabupaten Garut:

Tabel 1.2 Daftar Opini LKPD Kabupaten Garut

Pemerintah Daerah	Opini									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Garut	WDP	WDP	WTP							

Sumber: IHPS 2022 BPK RI

Eli Sintawati, 2024

PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013-2014, Kabupaten Garut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun, pada tahun 2016-2022 penilaian opini tersebut meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya, opini WTP merupakan opini yang diharapkan oleh setiap pemerintah daerah. Melihat dengan peningkatan ini tentunya, pemerintah Kabupaten Garut harus bisa mempertahankan opini WTP tersebut. Jangan sampai ditahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan seperti yang dialami pada tahun 2013-2014.

Meskipun demikian, terdapat temuan-temuan permasalahan mengenai hasil pelaporan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut ini. Dimana, pada tahun 2018 Garut Governance Watch (GGW), yang mana merupakan salah satu unsur di Kabupaten Garut itu mempertanyakan tentang hasil opini WTP dari BPK terhadap Kabupaten Garut tersebut. Dimana itu meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas pengendalian sistem intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan, penataan dan pengelolaan aset tetap. Menurut bapak Yuda selaku sekjen GGW, dalam menilai raihan opini WTP yang diraih pemerintah Kabupaten Garut itu masih banyak hal yang diragukan. Menurutnya, dalam meraih opini WTP itu bukan suatu hal yang mudah, apalagi engan berdasar pada kriteria yang digunakan BPK RI dalam penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal itu juga sejalan dengan temuan yang ditemukan pada LHP BPK RI perwakilan Jawa Barat. Dimana, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, sekjen GGW mempertanyakan kebenaran dari raihan WTP Kabupaten Garut juga berdasarkan pada kondisi yang mana pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut yang terbilang masih semrawut atau belum efektif. Maka dari itu, GGW menilai predikat opini yang diraih Kabupaten Garut saat ini hanya untuk kepentingan pencitraan pucuk pimpinan semata. (Aep Hendy – Kabarpriangan.com 2018).

Eli Sintawati, 2024

PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Disamping itu, setelah diumumkannya opini WTP yang diraih pemerintah Kabupaten Garut. Pada awal tahun 2023, dalam apel gabungan, Bupati Garut yaitu Rudy Gunawan dalam amanatnya beliau mengapresiasi penyerapan anggaran tahun 2022 yang telah mencapai 95,3%. Namun, masih terdapat kekecewaan hal itu dikarenakan masih banyaknya kualitas kegiatan yang tidak sesuai dengann harapan. Atas hal tersebut beliau mengingatkan untuk bersiap mempertanggungjawabkan APBD tahun 2022. Sehingga dirinya meminta BPKAD dan Inspektorat untuk melakukan monitoring terhadap laporan keuangan SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut juga berharap agar tidak ada lagi SKPD yang lambat dalam melaporkan laporan keuangan instansi mereka karena ini akan menghambat terhadap penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga hal ini perlu perhatian khusus agar tepat waktu. (jabarprov.go.id 2023).

Dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, terdapat beberapa faktor-faktor penunjangnya, diantaranya yaitu faktor kualitas informasi dan organisasi yang terdiri dari pelatihan akuntansi, teknologi informasi, integritas, kontinuitas dan budaya organisasi; faktor sumber daya manusia yang terdiri dari sumber daya manusia, asimetri informasi, latar belakang pendidikan, dan konservatisme; faktor pemahaman akuntansi dan modal yang terdiri dari pengetahuan akuntansi, pengalaman dalam informasi akuntansi dan pinjaman modal; faktor pengendalian inter yang terdiri dari sistem pengendalian intern yang terdiri, kepatuhan dengan standar dan konsistensi; faktor manajerial yang terdiri dari kemampuan manajemen.

Diantara berbagai faktor tersebut, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada beberapa faktor yaitu kompetensi SDM, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian internal. Tuntutan terhadap perbaikan pelaporan keuangan pemerintah harus bisa dijawab dengan perbaikan dan peningkatan yaitu dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas. Adanya fenomena keterlambatan pelaporan keuangan tersebut, salah satu hal yang melatarbelakanginya yaitu masih banyaknya para pegawai pemerintah

Eli Sintawati, 2024

PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

khususnya pemerintah daerah yang masih belum paham atau mengerti mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar. Tentunya dalam hal ini diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, berkompeten dan berintelektual yang tinggi dalam mengelola pelaporan laporan keuangan daerah.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelola keuangan. SDM harus memiliki kompetensi yang mumpuni dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Dimana menurut Riandani (2017), Sumber daya manusia dengan keterampilan yang baik akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten serta mampu memahami proses akuntansi dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas (Sundari dan Rahayu, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian Gasperz (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, hal itu berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Marfuah (2018), yang menyatakan bahwa kemampuan SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun sudah menjadi permasalahan yang lazim terjadi di pemerintahan, khususnya dalam pemerintah daerah bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, sering terjadi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kegagalan sumber daya manusia di Pemerintah Daerah dalam hal memahami dan menerapkan logika akuntansi itu tentunya akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat serta akan memunculkan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang diperlukan itu bukan hanya jumlah sumber daya

Eli Sintawati, 2024

PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

manusia akan tetapi kemampuan yang berkompeten yang dimiliki oleh SDM tersebut.

Sumber daya manusia juga harus mampu menguasai teknologi informasi (TI) demi mencapai tujuan organisasi. Setiap Perusahaan swasta ataupun pemerintah dalam penerapan teknologi informasi pasti memiliki tujuan yang berbeda. Hal itu dikarenakan penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adanya kemajuan dari teknologi informasi ini harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Hal itu sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, agar pengelolaan data lebih cepat, efektif dan efisien. Sehingga, dalam pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangannya berkualitas dan dapat dilaporkan tepat waktu. Pernyataan tersebut juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Astika dan Lilik (2018), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hal itu bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Della dan Rohmad (2019) bahwa pemanfaatan teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun pada faktanya, tidak semua sumber daya manusia di pemerintahan mampu memahami teknologi dan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut. Dimana, hal ini akan menghambat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh sdm yang memiliki kompetensi dan menguasai teknologi informasi. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang kuat pula. Riandani (2017) mendefinisikan “pengendalian internal adalah sarana untuk mengarahkan, memantau dan mengukur sumber daya organisasi dan memainkan peran penting dalam pencegahan dan deteksi kesalahan dan penyalahgunaan, terutama dalam laporan keuangan”. Pengendalian internal berfungsi memastikan keakuratan dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian internal akuntansi yang baik, risiko kesalahan dalam pencatatan atau penghitungan dapat diminimalkan, sehingga mampu mengurangi kemungkinan bahwa pemerintah daerah juga akan membuat kesalahan.

Dengan adanya SPI yang baik, akan mampu menghemat dan mencegah pemborosan yang akan berdampak pada kerugian entitas. Pengendalian intern mampu menjadi pedoman dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan kinerja pemerintah. Hal itu dikarenakan, SPI dapat menilai kinerja perusahaan dan manajemen, setiap entitas pelapor dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal memiliki peran yang penting dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hal itu sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Sinulingga dkk (2022) serta Sundari dan Rahayu (2019) bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan Della dan Rohmad (2019) bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh positif.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang integral terhadap tindakan yang selalu dilakukan oleh pimpinan atau pegawai secara terus menerus sebagai bentuk pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang efektif dan efisien, kualitas pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, dan kepatuhan

Eli Sintawati, 2024

PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap aturan yang berlaku. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menggunakan pengendalian intern sebagai salah satu kriteria dalam meneliti kewajaran laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah melakukan audit atas LKPD disetiap Kabupaten yang ada di Indonesia. Hal itu dapat terlihat, seperti dari tabel 1.2, yang mana menjelaskan perkembangan opini LKPD di Kabupaten Garut pada tahun 2013-2022. Selama sepuluh tahun tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan opini. Dimana dari tahun 2013-2014 opini LKPD Kabupaten Garut itu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun, mengalami peningkatan dari tahun 2015-2022 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana, setiap pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten Garut harus bisa mempertahankan opini tersebut jangan sampai mengalami penurunan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada mengenai kualitas informasi laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Garut berusaha untuk meraih hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada para SKPD agar meningkatkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah serta mengembangkan sistem pengendalian internal yang optimal. Dimana, untuk mendapatkan opini WTP itu dibutuhkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, yang mana dalam menyajikan laporan berkualitas itu memiliki faktor-faktor penunjangnya. Diantaranya yaitu kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan pengendalian internal.

Disamping itu, selain melihat dari fenomena-fenomena yang ada mengenai kualitas laporan keuangan, sehingga fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji. Selain dari itu, dari sisi penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya juga masih terdapat ketidak konsistenan mengenai hasil penelitiannya. Dimana, terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda, ada yang

menunjukkan hasil yang berpengaruh positif ada juga yang menyatakan hasil yang tidak berpengaruh. Tentunya hal ini juga menjadi menarik untuk diteliti.

Topik penelitian ini penting juga untuk dikaji pada pemerintah daerah Kabupaten Garut, yang mana dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Garut. Baik itu dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan yang berkualitas serta kontribusi dalam pengambilan Keputusan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Kompetensi SDM, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Garut”*.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimana Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Eli Sintawati, 2024

PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 3) Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penggunaan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis persoalan penerapan teori yang diperoleh di saat perkuliahan dengan praktik nyata, khususnya dalam akuntansi sektor publik.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para perangkat daerah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Serta memberikan wawasan mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penggunaan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.